

PENGARUH KARAKTERISTIK DAERAH, JUMLAH PENDUDUK, TEMUAN AUDIT, DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Fikrinah Naopal

Sri Rahayu

Siska Priyandani Yudowati

Universitas Telkom Bandung

Jl. Telekomunikasi No. 01 Teusan Buah Batu Bandung

fikrinahnaopal@gmail.com

Abstract: *The Local Government Financial Reports (LGFR) completed with disclosure is a form of accountability and transparency of information by local governments to report the results of its financial performance. This study aims to analyze the effect of government characteristic, population, audit findings, and audit opinion on the disclosure level of Local Government Financial Report(LGFR) in West Java. The population in this study was LGFR in West Java period 2014-2015. The sampling technique using saturation sampling. The research analysis used multiple regressions using SPSS version 17. The results show that government characteristic, population, audit findings, and audit opinion has simultaneous effects on the disclosure level of LGFR in West Java period 2014-2015. Partially, it is age of local government and audit opinion has positive effect, and size of local government, population and audit finding has not effect on the disclosure level of LGFR in West Java period 2014-2015.*

Abstrak: Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disertai pengungkapan adalah bentuk tanggung jawab serta transparansi informasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaporkan hasil kinerja keuangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Kemudian secara parsial, umur pemerintahan dan opini audit memiliki pengaruh positif sedangkan ukuran pemerintahan, jumlah penduduk dan temuan audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015.

Kata Kunci: Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, Opini Audit, Pengungkapan Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik saat ini telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dan telah melalui perubahan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Mahmudi (2011:2) dalam bukunya mengungkapkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggara negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Salah satu jenis organisasi sektor publik yaitu instansi pemerintah yang terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggung jawaban. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan ini berisi tentang SAP berbasis akrual penuh yang harus di terapkan pemerintah. Pada lampiran I peraturan ini menjelaskan tentang penerapan SAP berbasis akrual. Pada saat peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak pemerintah daerah yang tidak menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan SAP berbasis akrual, maka dari itu pemerintah kembali mengeluarkan lampiran II yang berisi SAP berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku selambat-lambatnya 4 tahun setelah peraturan ini di keluarkan.

Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi laporan keuangan yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut berisi pengungkapan dari pos-pos yang ada pada Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Perbedaan dasar peraturan akuntansi yang digunakan pada tahun 2014 dan 2015 ini juga berdampak pada pengungkapan dalam CaLK, yang mana akan ada penambahan pengungkapan dalam CaLK 2015 dan tahun selanjutnya dikarenakan bertambahnya laporan keuangan yang harus disajikan pemerintah daerah yang dulunya hanya 4 laporan menjadi 7 laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengungkapan laporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (Pemda), belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Lesmana (2010) menyatakan hasil bahwa rata-rata pengungkapan wajib LKPD hanya sebesar 22%. Penelitian dengan hasil yang lebih baik diungkapkan oleh Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemda (LKPD) Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2008-2009

adalah sebesar 52,09%. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam 2 tahun pengamatan yaitu 2014-2015 adalah sebesar 55% (hasil olah data, 2017). Bahkan hasil pengamatan tersebut juga memperlihatkan bahwa Kabupaten Bogor dengan proporsi jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki tingkat pengungkapan sebesar 54% pada tahun 2015 (hasil olah data, 2017), yang mana tingkat pengungkapan Kota Banjar sebagai daerah dengan proporsi jumlah penduduk paling sedikit masih lebih baik dengan perolehan 62% (hasil olah data, 2017).

Dari hasil tersebut terlihat adanya kesenjangan, dimana Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang paling banyak tetapi memiliki tingkat pengungkapan lebih rendah di bandingkan dengan Kota Banjar yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Berdasarkan pada hasil beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia masih cukup jauh dari pengungkapan yang memadai dan adanya kesenjangan yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

TINJAUAN TEORETIS

SAP merupakan pedoman dalam menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. SAP dijadikan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP juga mengatur mengenai informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana menetapkan, mengukur dan melaporkannya. Selain itu, SAP juga digunakan oleh pengguna laporan keuangan termasuk legislatif untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan. Sedangkan untuk pihak auditor eksternal (BPK) akan menggunakan SAP sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit keuangan (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).

Pengungkapan LKPD dalam CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 Kerangka Konseptual pada paragraf 83 menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas

Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Karakteristik Pemerintah Daerah

Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam penelitian karakteristik pemerintahan yang digunakan yaitu:

Ukuran Pemerintahan

Ukuran suatu entitas adalah skala dimana entitas tersebut dapat dikelompokkan berdasar besar kecilnya dengan beberapa cara tolak ukur. Ukuran pemerintahan diprosikan dengan total asset karena nilainya yang stabil dibandingkan dengan dasar penelitian lainnya (Khasanah 2014). Kabupaten atau kota dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya. Konsekuensinya, pemerintah daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan beserta pengelolaannya (Suhardjanto dkk, 2010) sehingga hal tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan yang lebih tinggi dan sesuai dengan pengungkapan wajib berdasarkan standar akuntansi.

Hilmi dan Martani (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa asset tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan, sedangkan penelitian oleh Susbiyani (2014) menyatakan bahwa ukuran pemda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan. Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu hipotesis bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan.

Umur Pemerintahan

Umur administratif suatu daerah adalah usia suatu daerah yang dihitung sejak terbentuknya pemerintahan daerah tersebut berdasarkan Undang-undang pembentukan daerah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012). Umur suatu daerah menunjukkan seberapa lama daerah tersebut telah ada atau berdiri. Umur

administratif pemerintah akan dinyatakan dalam satuan tahun yang dapat dilihat berdasarkan penerbitan peraturan perundang-undangan pembentukan pemerintah daerah tersebut. Hubungan umur pemerintah dengan penyajian laporan keuangan berbanding lurus, artinya semakin lama pemerintah itu berdiri maka laporan keuangan yang disajikan akan jauh lebih baik dikarenakan telah memiliki pengalaman dalam membuat laporan keuangan. Umur pemerintahan ini juga seharusnya berbanding lurus dengan penyajian pengungkapan pada CaLK, yang artinya jika semakin lama pemerintah itu terbentuk maka pemerintah akan menyajikan tingkat pengungkapan yang memadai dikarenakan banyaknya pengalaman.

Penelitian Waliyyani dan Makhmud (2015) mengungkapkan bahwa umur pemda berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD sedangkan hasil lain di temukan oleh Nurtari (2016) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa umur administratif pemerintah daerah tidak berpengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis bahwa umur pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjabarkan “penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

Penelitian yang dilakukan Hilmi dan Martani (2012) menyatakan bahwa jumlah penduduk berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat pengungkapan dikarenakan semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat untuk meminta pengungkapan yang lebih besar sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil hipotesis bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Temuan Audit

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Khasanah 2014). Liestiani (2008) menjelaskan

temuan Audit selama proses audit dapat menginformasikan sesuatu hal yang penting yang terkait dengan masalah-masalah yang terdapat pada auditee. Temuan audit ini akan berbanding lurus dengan tingkat pengungkapan yang akan di sajikan dalam CaLK, yaitu semakin banyak jumlah temuan yang di temukan maka semakin banyak jumlah pengungkapan yang akan disajikan. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi. Pengungkapan yang lebih dilakukan sebagai upaya perbaikan dan koreksi atas temuan audit yang ditemukan BPK dan menunjukkan pada publik adanya perbaikan kualitas yang dilakukan pemerintah daerah atas saran dari BPK. Berdasarkan penjelesaian tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif antara jumlah temuan audit dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Opini Audit

Menurut Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraph 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang dinyatakan melalui opini auditor, didasarkan atas 4 kriteria yaitu : (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian internal. Salah satu kriteria yang menentukan opini auditor yaitu kecukupan pengungkapan yang berarti semakin tinggi opini audit yang di terima suatu daerah maka tingkat pengungkapan yang disajikan juga tinggi/memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Andriani (2012) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh akan menghasilkan 27 sampel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang jika ditotalkan untuk dua tahun masa pengamatan akan menghasilkan 54 sampel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Rumus regresi berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + e$$

Keterangan:

- Y : Tingkat Pengungkapan LKPD
- α : Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$: Koefisien regresi
- X_1 : Ukuran pemerintah daerah
- X_2 : Umur Pemerintahan
- X_3 : Jumlah Penduduk
- X_4 : Temuan Audit
- X_5 : Opini Audit
- e : Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji hipotesis secara simultan (uji F) dan uji secara parsial (uji t). Berikut operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Ukuran Pemerintahan Daerah (X_1)	<i>Size</i> = Ln Total Aset	Rasio
Umur Pemerintahan Daerah (X_2)	AGE = Umur Pemda Berdasarkan UU Pembentukan Masing-masing Pemerintah Daerah	Nominal
Jumlah Penduduk (X_3)	<i>Population</i> = Ln Jumlah Penduduk	Rasio
Temuan Audit (X_4)	FIND = Jumlah Temuan	Nominal
Opini Audit (X_5)	1. Wajar Tanpa Pengecualian 2. Wajar Dengan Pengecualian 3. Tidak Wajar 4. Tidak Memberikan Pendapat	Ordinal
Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)	$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yg harus diungkapkan}} \times 100$	Rasio

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari uji deskriptif tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata (*mean*) tingkat pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama periode 2014-2015 adalah sebesar 0,55. Nilai minimum tingkat pengungkapan LKPD yaitu sebesar 0,45 dan nilai tertinggi tingkat pengungkapan LKPD yaitu 0,66. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) nilai ukuran Pemda (*size*), umur Pemerintah Daerah (*age*), jumlah penduduk (*pop*), dan temuan audit (*finds*) lebih besar dari standar deviasi tersebut yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut bervariasi penyebarannya atau memiliki data yang berkelompok. Nilai minimum

opini audit (*opini*) yaitu 1 dan nilai tertinggi yaitu 4 karena menggunakan sistem peringkat. Berikut ini adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional:

Tabel 2: Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Disc	.45	.66	.55	.05
Size	27.93	30.86	29.08	.69
Age	2.00	65.00	50.20	23.25
Pop	12.10	15.51	14.09	.82
Finds	7.00	42.00	15.00	6.00
Opini	1.00	4.00		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Uji Hipotesis

Sebelum uji hipotesis diawali dengan melakukan pengujian asumsi klasik dan tidak ditemukan permasalahan asumsi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F). Berikut hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) pada penelitian ini.

Tabel 2: Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.027	5	.005	2.530	.041 ^a
1 Residual	.102	48	.002		
Total	.129	53			

a. Predictors: (Constant), Opini, Pop, Age, Finds, Size

b. Dependent Variable: Disc

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas, nilai signifikansi sebesar $0.041 < 0.05$ yang mengartikan bahwa H_0 ditolak. Sehingga hasil tersebut dapat di menjelaskan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yang terdiri dari ukuran Pemda (*size*), umur Pemda (*age*), jumlah penduduk (*pop*), temuan audit (*finds*) dan opini audit (*opini*) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015.

Tabel 3 uji parsial (uji t) di bawah ini mengungkapkan bahwa jika nilai variabel independen 0 maka tingkat pengungkapan LKPD adalah 68,90. Koefisien ukuran Pemda (*size*) sebesar -0.005 artinya jika ukuran Pemda (*size*) mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan LKPD turun sebesar 0.005. Koefisien tingkat umur Pemda (*age*) sebesar 0.001 artinya jika

Naopal, Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk...

Pemda (*age*) mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan LKPD naik sebesar 0.001. Koefisien jumlah penduduk (*pop*) sebesar -0.008 artinya jika jumlah penduduk (*pop*) mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan LKPD turun sebesar 0,008. Koefisien temuan audit (*finds*) sebesar 0.001 artinya jika temuan audit (*finds*) mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan LKPD naik sebesar 0,001. Koefisien opini audit (*opini*) sebesar 0.022 artinya jika opini audit (*opini*) mengalami kenaikan sebesar 1 dan nilai variabel lain tetap maka tingkat pengungkapan LKPD naik sebesar 0,022.

Tabel 3: Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.689	.343		2.009	.050
Size	-.005	.016	-.077	-.352	.727
Age	.001	.000	.332	2.373	.022
Pop	-.008	.012	-.127	-.617	.540
Finds	.001	.001	.151	.941	.352
Opini	.022	.010	.314	2.179	.034

a. Dependent Variable: Disc

Sumber : Hasil Pengelohan SPSS, 2017

Berdasarkan tabel di atas, hasil persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengungkapan LKPD} = 68.90 - 0.005\text{Size} + 0.001\text{age} - 0.008\text{Pop} + 0.001\text{Finds} + 0.022\text{Opini} + e$$

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Variabel ukuran Pemda (*size*) memiliki koefisien -0.005 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.727 yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0.05 maka H_0 diterima sehingga menunjukkan bahwa variabel ukuran Pemda (*size*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Hal tersebut mengartikan bahwa walaupun ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total asset memiliki nilai yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan tingkat pengungkapan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan asset yang dimiliki pemerintah daerah biasanya berjumlah sangat besar, tapi tidak diikuti dengan pencatatan yang benar dan baik. Dalam total asset yang disajikan dalam neraca, komponen asset tetap biasanya memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan asset lancar. Jumlah asset tetap yang besar ini akan diikuti oleh penyajian dan pencatatan yang lengkap atas asset-aset tetap yang di miliki

pemerintah, tetapi pada kenyataannya asset tetap sering menjadi masalah yang menimbulkan adanya temuan-temuan oleh auditor pada saat pemeriksaan dikarenakan perhitungan hingga pengakuan asset tanpa adanya sertifikat yang mendukung. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Walliyani dan Mahmud (2015) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total asset tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dikarenakan asset yang dimiliki pemerintah daerah biasanya berjumlah sangat besar, tapi tidak diikuti dengan pencatatan yang benar dan baik.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Variabel umur Pemda (*age*) memiliki koefisien 0.001 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.022 yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0.05 sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel umur Pemda (*age*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Hal tersebut mengartikan semakin lama suatu daerah tersebut terbentuk (umur pemerintah) maka tingkat pengungkapan LKPD yang disajikan akan semakin baik. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setyaningrum dan Syafitri (2012) yang menyatakan bahwa umur administrative pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Adanya hubungan positif yang signifikan antara umur pemerintah daerah dan tingkat pengungkapan LKPD, disebabkan karena pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pengalaman tersebut dari tahun ketahun akan sangat bermanfaat saat menyusun laporan keuangan dikarenakan Pemda dengan umur yang lebih lama telah melewati masa pemeriksaan lebih banyak serta kemungkinan melakukan perbaikan atas temuan audit yang di laporkan, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya pemerintah daerah akan mampu memperkecil kesalahan yang ada dalam laporan keuangan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Variabel jumlah penduduk (*pop*) memiliki koefisien -0.008 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.540 yang mana nilai ini lebih besar daripada 0.05 sehingga H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (*pop*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Walaupun jumlah penduduk suatu daerah kabupaten/kota memiliki nilai yang tinggi, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingkat pengungkapan yang tinggi pula. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh capaian kinerja pembangunan di Jawa Barat yang meningkat (Bappeda Jawa Barat). Dengan adanya bukti nyata bahwa pembangunan di Jawa Barat semakin meningkat, maka hal ini juga secara langsung dapat menjelaskan bahwa penggunaan anggaran pemerintah telah tepat dan sesuai sasaran. Hal itu juga akan menumbuhkan rasa percaya masyarakat akan pengelolaan pemerintahan yang baik, yang mana hal ini kemungkinan akan mengurangi dorongan masyarakat dalam meminta keterbukaan pengelolaan anggaran dikarenakan bukti nyata pembangunan meningkat telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian Nurtari (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

variabel temuan audit (*finds*) memiliki koefisien 0.001 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.352 yang mana nilai ini lebih besar daripada 0.05 sehingga H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel temuan audit (*finds*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Walaupun jumlah temuan audit memiliki jumlah yang tinggi, namun hal tersebut tidak diikuti dengan tingginya pengungkapan LKPD yang harus disajikan. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Waliyyani dan Mahmud (2015) serta penelitian Hendriyani dan Tahar (2015) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh kepada tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan pengukuran variabel temuan yang hanya menggunakan jumlah temuan saja sehingga kurang sesuai. Jumlah temuan tidak merepresentasikan angka sebenarnya, karena jumlah temuan yang banyak belum tentu nilainya material. Artinya jumlah temuan yang banyak belum tentu terdiri dari temuan yang membutuhkan tindak lanjut atau penyajian pengungkapan dalam CaLK begitupun sebaliknya bahwa jumlah temuan yang sedikit belum tentu terdiri dari jumlah temuan yang tidak membutuhkan tindak lanjut atau penyajian pengungkapan dalam CaLK.

Pengaruh Opini Audit terhadap terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Variabel opini audit (*opini*) memiliki koefisien 0.022 dengan nilai probabilitas signifikansi 0.034 yang mana nilai ini lebih kecil daripada 0.05 sehingga H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel opini audit (*opini*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD tahun 2014-2015. Hal tersebut berarti bahwa apabila opini audit mengalami kenaikan maka tingkat pengungkapan informasi juga akan naik. Hal ini berarti semakin tinggi nilai opini audit maka tingkat pengungkapan akan semakin besar. Pemerintah daerah yang memiliki opini audit yang bagus berarti memiliki pelaporan dan pelaksanaan keuangan yang baik dan cenderung tidak akan menutupi informasi pelaksanaan yang baik ini. Pengungkapan LKPD yang memiliki opini audit yang bagus akan menjadi sinyal positif bagi masyarakat terhadap pemerintah daerahnya. Sehingga akan mendorong terciptanya transparansi informasi kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahim dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa opini audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi keuangan pada website.

PENUTUP

Secara simultan variabel ukuran Pemda, umur Pemda, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014-2015. Opini audit dan umur pemerintah daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial

terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014-2015, sedangkan ukuran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan temuan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat tahun anggaran 2014-2015. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2014-2015 hanya sebesar 55%, yang mana hasil tersebut masih cukup rendah namun telah menunjukkan perubahan lebih baik jika dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak dan beragam dari pada penelitian ini seperti menambah tahun pengamatan agar dapat melihat perkembangan tingkat pengungkapan atau menambah daerah yang bisa di teliti serta menambah variabel penelitian lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan seperti tipe pemerintah, dan jumlah SKPD. Pemerintah daerah diharapkan dapat fokus memenuhi kriteria agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya dengan menyajikan pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memberikan pelatihan mengenai pengelolaan aset daerah dimana hal tersebut sering menjadi masalah yang membuat adanya temuan dari BPK. Bagi publik, baik masyarakat, kreditur, dan investor dapat membantu pengawasan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan sehingga dapat tercipta transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Hasil Sensus Penduduk 2010*. <https://www.bps.go.id/>. [5 Oktober 2016].
- Buletin Teknis (Bultek) 01 Tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah.
- Hendriyani dan Tahar. 2015. Analisis Fakto-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 22(1): 25 – 33.
- Hilmi, Zul Amiruddin dan Dwi Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *E-Jurnal Akuntansi. Universitas Indonesia*: 1-26.
- Khasanah, Nur L. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3): 1-11.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Liestiani, Annisa. 2008. Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. *Skripsi*. FE UI. Depok.
- Mahmudi. 2011. *Akunatnsi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.

Naopal, Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk...

- Nurtari, Fadilah, dan Nucholisah. 2016. Pengaruh Karakteristik dan Kompleksitas Pemerintah Daerah Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi pada LKPD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2014). *Jurnal Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung*, 2(1): 263-270.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 Pernyataan 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua.
- Rahim, Wanda Mustika dan Dwi Martani. 2012. Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Setyaningrum Febriyani dan Dyah Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2): 154-170.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., Brown, A. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. *Penelitian Hibah Publikasi Internasional*, LP2M UNS: 1-13
- Susbiyani, Arik. 2014. The Compliance with Mandatory Disclosure of Financial Statement : A Study from Local Government in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(10): 1-8.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Walliyani dan Mahmud. 2015. Pengaruh Karakteristik Peemrintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*: 1-8.